

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abhan, 2019, *Buku Laporan Kinerja Bawaslu*, Bawaslu RI, Jakarta
- Admosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2015
- Arifin Zainal Moechtar, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Anggraini Titi, 2011, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Perludem, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017 *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Mengawal Kehormatan Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, Jawa Timur
- Buku Pedoman IDEA, 2016, *Desain Penyelenggara Pemilu*
- Dr. Wasis Susetyo, 2016, *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Djojodipoero, Soerastri I, 1995, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Fadjar, A. Mukthi, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Fuqori Sarah, 2018, *Politik Hukum Kewenangan DKPUP Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Adil Dan Berintegritas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT. Alumni Bandung.
- Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wicana, Yogyakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dam Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Prasetyo, Teguh, 2018, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu 2019
- Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu* Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. Mahmudi, Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Surbakti, Ramlan, 2016, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Kelompok Gramedia, Semarang.
- Suswanto, Gunawan, 2015, *Pengawasan Pemilu Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta Timur
- Tjandra, Riawan 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Triwulan, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta
- Yugha Erlangga, 2018, *Apa Dan Siapa Bawaslu*, Bawaslu RI.

## **B. Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi,dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

## **C. Penelitian/Jurnal**

- Intan Widya Ningrum, 2018, “Administrasi Sengketa Proses Pemilu Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Mahasiswa UNNES, Semarang
- Anita Andriani Siregar, 2019, “Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Implementasinya di Daerah”, Mahasiswa UNILA, Lampung.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH BAWASLU DAN PTUN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Penetapan PKPI Sebagai Peserta  
Pemilihan Umum 2019)**

ASIA PENESWELA MANIK, Dr. Oce Madril S.H.,M.A

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Bakhrul Amal, 2019, "*Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Indonesia*".
- Ahmad Rizqi Robbani Kaban, 2019, "*Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu*", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Taruma Negara.
- Zain Faizin, 2018, "*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)*" Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta